

PERANAN PEMIMPIN INFORMAL DAN FORMAL DI DESA BOGONUK DISTRIK WONIKI KABUPATEN TOLIKARA

Ebara Tabuni
060817003

ABSTRACT

In any organization there is always a relationship that will determine the character of the organization. Formal relationship will bearing formal organizations, while informal relationships will bearing the informal organization. Formal leadership is leadership that is authorized through official appointment mechanism for leadership positions. Leadership pattern is seen in a variety of conditions governing the hierarchy in an organization. However, formal leadership will not automatically be accepted as a guarantee of a “real leader” by subordinates. Acceptance of formal leadership remains to be tested in practice the results will be seen in the life of the organization. While the informal leadership also called headship is not based on the type of appointment and not visible in the official organizational structure. However, the effectiveness of informal leadership shown in real acknowledgment and acceptance of subordinates in leadership practice. Usually informal leadership based on several criterias. Among these are the ability to "lure" the hearts of others, the ability to foster harmonious relations with others and have a particular expertised that is not owned by someone else. Leaders arise as a result of the approval of members of the organization who have volunteered to be a followers. Therefore both types of leaders, leaders of both formal and informal leaders must achieve recognition of the party led. True leaders achieve their status as voluntary recognition of the party led. A leader must reach and kept beliefs of others. In a letter decision, the person can be given a lot of power but it does not automatically make him a leader in the true sense.

Keywords: Lanny, cultural, leader, informal leader, formal leader

ABSTRAK

Dalam setiap organisasi selalu terdapat hubungan yang akan menentukan corak organisasi. Hubungan formal akan melahirkan organisasi formal, sementara hubungan informal akan melahirkan organisasi informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang melalui mekanisme pengangkatan resmi untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Pola kepemimpinan tersebut terlihat pada berbagai ketentuan yang mengatur hirarki dalam suatu organisasi. Namun kepemimpinan formal tidak akan secara otomatis menjadi jaminan seorang pemimpin diterima sebagai pemimpin yang “sebenarnya” oleh bawahan. Irimaan atas pimpinan formal masih harus diuji dalam praktik yang hasilnya akan terlihat dalam kehidupan organisasi. Sementara kepemimpinan informal yang juga disebut *headship* merupakan tipe yang tidak mendasarkan pada pengangkatan serta tidak terlihat pada struktur organisasi resmi. Namun efektivitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan bawahan dalam praktek kepemimpinannya. Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada beberapa kriteria. Di antaranya adalah kemampuan “memikat” hati orang lain, kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain dan memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pemimpin timbul sebagai hasil dari persetujuan anggota organisasi yang secara sukarela menjadi pengikut. Oleh karena itu kedua tipe pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin informal mesti mencapai pengakuan dari pihak yang dipimpin. Pemimpin sejati mencapai status mereka karena pengakuan sukarela dari pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin harus mencapai serta mempertahankan kepercayaan orang lain. Dengan sebuah surat keputusan, maka seseorang dapat diberikan kekuasaan besar tetapi hal tersebut tidak secara otomatis membuatnya menjadi seorang pemimpin dalam arti yang sebenarnya.

Kata kunci: Lanny, budaya, pemimpin, pemimpin informal, pemimpin formal

Latar Belakang

Propinsi Papua didiami oleh beraneka suku bangsa yang ditandai dengan beraneka-ragam bahasa. Pada umumnya penduduk di Papua secara garis besar dapat dibedakan antara kebudayaan dari penduduk yang bermukim di daerah pantai utara, penduduk di daerah pegunungan Jayawijaya, penduduk di daerah rawa-rawa di bagian selatan sampai pada wilayah perbatasan dengan Papua Nugini. Penduduk yang mendiami daerah pegunungan disebut suku Dani yang berasal dari lembah Baliem, dan menjadi wilayah administrasi kabupaten

Jayawijaya dengan ibu kota Wamena. Luasnya wilayah kabupaten Jayawijaya kemudian mendorong terjadinya pemekaran daerah yang menghasilkan beberapa kabupaten baru yang di antaranya ialah kabupaten Tolikara.

Suku Dani adalah salah satu kelompok etnis yang memiliki jumlah besar di Papua. Suku Dani sendiri masih terbagi ke dalam beberapa kelompok dan mendiami wilayah kabupaten seperti suku Lanny yang tersebar di bagian barat Jayawijaya termasuk Kabupaten Tolikara. Suku Lanny sendiri dalam bahasa daerah Wamena mempunyai arti atau makna ejekan yaitu : “Pulang orang-orang bagian Barat, di sini bukan tempatmu”. Suku Lanny di Tolikara menyebar di 15 desa termasuk di dalamnya desa Bogonuk yang terletak di distrik Woniki.

Struktur pemerintahan di desa Bogonuk tidak berbeda dengan struktur pemerintahan di wilayah lainnya di Indonesia. Namun yang menjadi pembeda adalah hadirnya struktur kepemimpinan informal yang berbentuk sistem kepemimpinan suku yang dimiliki oleh orang Lanny secara turun-temurun. Pemimpin suku dalam suatu desa merupakan seorang pemimpin yang memiliki peran dan status yang sama pentingnya dengan Kepala Desa. Kepala suku ini disebut “Ondowafi”.

Jika Kepala Desa dengan aparatnya dipilih dan diangkat dengan pengaturan sistem pemerintahan dari Kabupaten melalui Distrik hingga ke Desa, maka Kepala Suku dipilih dan diangkat oleh masyarakat di Desa. Bentuk kepemimpinan Kepala Suku ini digolongkan pada bentuk kepemimpinan mencakup yaitu kepemimpinan yang peran atau wewenangnya tidak terbatas hanya pada aspek tertentu saja tetapi mencakup hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Suatu pemimpin jenis ini biasanya didukung oleh suatu kewibawaan dengan lambang-lambang yang resmi (Koentjaraningrat, 1982 hal 180).

Pembedaan juga terjadi dalam fungsi dan tanggung jawab kedua jenis pemimpin ini. Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa dan aparatnya yang ditetapkan dalam masyarakat oleh pemerintah melalui Kepala Distrik, melakukan tugasnya untuk menangani aktivitas sesuai dengan program pemerintah dari Distrik. Sedangkan pemimpin informal yang disebut Ondowafi dipercayai oleh masyarakat mengatur hal-hal yang menyangkut hak-hak kepemilikan tanah, sebagai ahli di bidang adat-istiadat dan urusan keamanan. Kedua pemimpin ini tidak saling menegasikan sebaliknya saling mendukung.

Peranan Pemimpin Formal dan Informal

Dalam setiap organisasi selalu terdapat hubungan yang akan menentukan corak organisasi. Hubungan formal akan melahirkan organisasi formal, sementara hubungan informal akan melahirkan organisasi informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang melalui mekanisme pengangkatan resmi untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Pola kepemimpinan tersebut terlihat pada berbagai ketentuan yang mengatur hirarki dalam suatu organisasi. Namun kepemimpinan formal tidak akan secara otomatis menjadi jaminan seorang pemimpin diterima sebagai pemimpin yang “sebenarnya” oleh bawahan. Penerimaan atas pimpinan formal masih harus diuji dalam praktek yang hasilnya akan terlihat dalam kehidupan organisasi. Sementara kepemimpinan informal yang juga disebut *headship* merupakan tipe yang tidak berdasarkan pada pengangkatan serta tidak terlihat pada struktur organisasi resmi. Namun efektifitas

kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan bawahan dalam praktek kepemimpinannya.

Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada beberapa kriteria. Di antaranya adalah kemampuan “memikat” hati orang lain, kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan orang lain dan memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain.

Pemimpin timbul sebagai hasil dari persetujuan anggota organisasi yang secara sukarela menjadi pengikut. Oleh karena itu kedua tipe pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin informal mesti mencapai pengakuan dari pihak yang dipimpin. Pemimpin sejati mencapai status mereka karena pengakuan sukarela dari pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin harus mencapai serta mempertahankan kepercayaan orang lain. Dengan sebuah surat keputusan, maka seseorang dapat diberikan kekuasaan besar tetapi hal tersebut tidak secara otomatis membuatnya menjadi seorang pemimpin dalam arti yang sebenarnya.

Teori Kepemimpinan dan Tipe-tipe Kepemimpinan

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli untuk mendefinisikan bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya pemimpin, ada tiga teori yang cukup menonjol.

Dalam pandangan *genetic theory*, disebutkan bahwa “*leaders are born and not made*”. Para penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ada bukan karena ia dilahirkan dengan bakat memimpin. Keadaan atau situasi bukan dianggap sebagai faktor penentu lahirnya seorang pemimpin. Seseorang akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin.

Sementara menurut pandangan *social theory*, memandang dengan arah yang berkebalikan dengan teori yang pertama. Para penganut teori ini berpegangan pada tesis bahwa “*leaders are made and not born*”. Teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu.

Teori lain tentang pemimpin adalah *ecology theory*. Teori ini merupakan perpaduan dari kedua teori di atas. Teori ini menilai bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Bakat-bakat ini kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan diri lebih lanjut.

Jika dilihat dalam klasifikasi tipe, ada lima jenis pemimpin. Yang pertama adalah tipe pemimpin otokratik, tipe pemimpin militeristik, tipe pemimpin paternalistik, tipe pemimpin karismatik dan tipe pemimpin demokratis.

Dalam pengertiannya, tipe pemimpin otokratik berpandangan bahwa pemimpin adalah merupakan suatu hak. Hal ini dapat dilihat dari ciri-cirinya yang antara lain; menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi dan mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Tipe pemimpin ini juga memandang bahwa bawahan adalah alat semata dan tidak mau menerima kritik, saran serta pendapat dari orang lain karena menganggap diri sebagai yang paling benar. Pemimpin otokratik juga selalu bergantung pada kekuasaan formal. Metode yang digunakan pemimpin tipe ini untuk menggerakkan bawahan menggunakan

pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Itu mengapa tipe pemimpin ini dianggap tidak cocok diterapkan dalam organisasi modern.

Tipe pemimpin berikut adalah tipe militeristik. Namun penting untuk dipahami bahwa tipe pemimpin militeristik tidak bisa diasosiasikan dengan pemimpin dalam organisasi militer. Pemimpin bertipe militeristik akan memiliki beberapa ciri-ciri. Corak pertama adalah perintah mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Ciri berikut, pemimpin tipe ini akan menggerakkan bawahan dengan menggunakan pendekatan pangkat dan jabatannya. Pemimpin militeristik juga senang dengan formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan serta anti kritik. Jenis pemimpin militeristik juga sangat menggemari berbagai upacara formal untuk menegaskan kepemimpinannya.

Tipe pemimpin paternalistik ciri ini menggunakan pengaruh yang bersifat kebapakan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadang-kadang pendekatan yang dilakukan sifat terlalu sentimental. Sifat-sifat umumnya adalah menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa yang berakibat timbulnya sikap yang terlalu melindungi bawahan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan tipe pemimpin ini jarang memberikan kesempatan kepada bawahan serta kesempatan untuk mengembangkan inisiatif daya kreasi. Karena menganggap dirinya maha tahu, maka sangat jarang ada pelimpahan wewenang kepada bawahan.

Jenis pemimpin karismatik sering didefinisikan sebagai individu yang memiliki daya tarik yang amat besar, dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut tipe ini agak sulit menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini. Seiring kurangnya seorang pemimpin yang bertipe karismatik, maka sering dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib. Syarat seperti kekayaan dan strata pendidikan tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatik.

Tipe pemimpin terakhir dikenal sebagai jenis pemimpin demokratis. Tipe pemimpin demokratik dianggap sebagai tipe yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Ciri yang terlihat antara lain adalah usaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi. Tipe pemimpin ini juga senang menerima saran, pendapat dan bahkan dari kritik bawahannya. Dalam proses kepemimpinan, pemimpin demokratik juga lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan. Itu mengapa di dalam organisasi modern, tipe pemimpin seperti ini adalah jenis yang dianggap paling tepat.

Syarat-syarat Pemimpin yang Baik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang yang tergolong sebagai pemimpin yang ideal adalah seorang yang pada waktu lahirnya telah diberkahi dengan bakat-bakat kepemimpinan dan mengembangkan bakat genetisnya melalui pendidikan dan pengalaman. Pengembangan kemampuan adalah proses yang berlangsung terus menerus dengan maksud agar seseorang dapat menjadi pemimpin yang ideal.

Walaupun belum ada kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Akan tetapi secara

umum ada beberapa syarat seseorang dapat dikategorikan sebagai pemimpin yang baik. Syarat-syarat itu semisal memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kemampuan analitik, daya ingat yang baik serta keinginan untuk terus berkembang dan memiliki karakter integratif.

Syarat lain yang mesti dimiliki seorang pemimpin adalah ketrampilan berkomunikasi dan mendidik. Ia juga mesti memiliki sikap objektif serta mampu menentukan prioritas. Seorang pemimpin juga dituntut untuk sederhana namun berani dan tegas dalam mengeksekusi keputusan.

Peranan Pemimpin Formal di Desa Bogonuk

Setiap pemimpin memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang mesti dijalankan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam metode kepemimpinannya. Tugas, wewenang dan kewajiban ini juga dibedakan jika mengacu pada jenis pemimpin yang hadir di dalam masyarakat; yaitu pemimpin formal dan pemimpin informal. Dalam masyarakat suku Lanny yang mendiami desa Bogonuk, distrik Woniki, kabupaten Tolikara, maka tugas, wewenang dan kewajiban pemimpin dapat dibedakan dengan mengacu pada pelaksanaan hal-hal tersebut.

Pemimpin formal yaitu Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ia juga bertugas untuk memimpin rapat dan musyawarah dalam kerangka mekanisme koordinasi dengan pemerintah Distrik dan Kabupaten. Seorang Kepala Desa juga bertanggungjawab untuk mengelola administrasi dan mengurus masalah di kalangan masyarakat yang terkait dengan kebijakan administratif birokrasi.

Wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa misalnya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kepala Desa juga bertugas mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Ia juga merupakan wakil desanya di dalam dan di luar pengadilan serta berhak untuk menunjuk kuasa hukum yang akan mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seorang Kepala Desa juga berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa berkewajiban untuk segenap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan hidup yang demokratis. Sebagai Kepala Desa, seseorang juga dituntut untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Tugas lain yang mesti dijalankan adalah menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

Peranan Pemimpin Informal di Desa Bogonuk

Istilah Kepala Suku berasal dari kata Indonesia “kepala” artinya bagian tubuh dari leher ke atas, sesuatu benda yang diatas atau sesuatu yang terutama, terpenting, yang paling pokok, pimpinan (Nur Hazin, 2004: 285). Sedangkan “suku-suku bangsa” menurut Koentjaraningrat, (1994:91) diartikan kelompok etnik (*ethnic group*). Jadi dapat diartikan bahwa Kepala Suku adalah seorang yang diatas atau terutama dan terpenting atau pimpinan dalam suatu kelompok etnis atau suku bangsa.

Menurut Taliziduhu Ndraha, (2003 : 212) kepala (*head*) adalah gejala kekuasaan (*power*). Kepala diberi atau memperoleh kekuasaan sah (*legitimate power*) yang disebut otoritas (*authority*) melalui cara tertentu: turun-temurun (tradisi), diberi (kekuasaan, dipersembahkan, dilimpahkan, dipilih, ditunjuk), berbagi (*sharing*), diakui (kesaktian, kehebatan, dipuji, dipercayai), atau penaklukan melalui kekerasan. Inti otoritas adalah perintah (*orde, Befehl*), inti perintah adalah kekuatan (*strength, force*), inti kekuatan adalah paksaan (*coercion*), inti paksaan adalah kekerasan (*violence*), dan inti kekerasan atau pematian (*sentenced to death*) atau penghilangan orang.

Koentjaraningrat, (1994:93) menganjurkan untuk memakai istilah “suku bangsa” saja karena istilah “kelompok etnik” dinilai tidak cocok. Sifat kesatuan dari suatu suku bangsa bukan sifat kesatuan suatu kelompok, melainkan sifat kesatuan “golongan”. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa konsep suku bangsa adalah suatu golongan yang terikat oleh suatu kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”. Kesadaran dan identitas tersebut dikuatkan juga oleh kesatuan bahasa.

Dilihat dari konsep “kepala” dan “suku bangsa” di atas maka Kepala Suku adalah seseorang yang mempunyai kekuatan, kemampuan untuk memimpin dan memerintahkan suatu golongan yang terikat dalam suatu kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan (suku bangsa). Kepala suku merupakan kepala suku yang mempunyai tipe kepemimpinan karismatik (Monsobean, 1995: 44).

Masyarakat Suku Danni (Lanny) pada umumnya memiliki variasi sosial budaya yang beraneka ragam. Keragaman ini berupa bahasa, kesenian, suku, adat-istiadat, pola pemukiman, sistem ekonomi, organisasi sosial serta sistem kepemimpinan (Kepala Suku) tradisional. Di dalam masyarakat suku Danni (Lanny), jenis kepemimpinan yang dianut oleh Kepala-Kepala Suku adalah jenis karismatik.

Di dalam suku Lanny pembagian kepala-kepala suku antara lain: (a) pimpinan unit pemukiman, (b) pimpinan kelompok perkampungan, (c) pimpinan masyarakat suku kecil/klan, (d) sub konfederasi, (e) pimpinan konfederasi dan (f) pimpinan aliansi. Sedangkan jika ditinjau dari aspek politik saja, maka terdapat 4 peringkat pimpinan organisasi politik suku Lanny yang paling eksistensinya. Peringkat itu dapat diurutkan sebagai berikut: (1) pemimpin unit pemukiman, (2) pimpinan sub konfederasi, (3) pimpinan konfederasi dan (4) pimpinan aliansi.

Hubungan aliansi antar pemimpin antara aliansi jarang terjadi, sebab pada dasarnya aliansi-aliansi saling bermusuhan secara tetap. Kepemimpinan konfederasi yang bermasalah jarang berhubungan, meskipun wilayahnya saling berbatasan. Hal itu disebabkan karena adanya rasa saling curiga turun-temurun terhadap warga-warga konfederasi musuh. Kecurigaan itu cukup beralasan karena sering terjadi pembunuhan tiba-tiba di luar peperangan oleh musuh yang terjadi.

Hubungan intens dan erat di dalam wilayah konfederasi yang terjalin antar pimpinan sub konfederasi berpengaruh hingga ke tingkat bawah hingga tingkat aliansinya tetap terjaga dan saling membutuhkan (Prof. Dr. Asrid S. Susanto hal. 82: 83).

Kemudian secara histologis filosofis, Kepala Suku dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa (*volkgeist*) suatu masyarakat yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu setiap bangsa yang ada di dunia ini memiliki adat (kebiasaan) sendiri-sendiri. Adanya ketidaksamaan tersebut membuat kita dapat mengetahui bahwa adat (kebiasaan) merupakan unsur penting dan memberikan identitas pembeda kepada sebuah kelompok disamping bangsa lain yang ada di dunia.

Kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang kepala suku menurut adat dan tradisi masyarakat suku Danni adalah kemampuan *wim* yang berarti perang, kemampuan *akui mbere* yang berarti memiliki banyak istri (poligami), kemampuan *wim ekak* artinya bertugas kepala perang, kemampuan *wone mbangak* yang berarti memecahkan suatu persoalan yang rumit secara adil dan bijaksana. Di luar empat kekuatan pokok ini, seorang Kepala Suku masih diharuskan memiliki keahlian dan kemampuan. Di antara empat kekuatan pokok yang dijelaskan di atas, yang paling penting adalah sebutan *big man* (pria berwibawa) atau dalam bahasa suku Lanny disebut dengan *Gain-endage warak lago lakak, jabu ekak*. Hal ini misalnya terlihat saat berlangsungnya perang suku. Perang kemudian digunakan sebagai kesempatan untuk memperbesar pengaruh seorang Kepala Suku apabila dapat menunjukkan keberanian perang (membunuh) dan dominan dalam pengatura strategi perang hingga mampu mengalahkan musuh.

Ciri pertama dari kepala adat (kepala suku) ialah kedudukan pemimpin diperoleh melalui pencapaian individual. Dalam masyarakat suku Lanny, sumber kekuasaan dari pola kepemimpinan kepala suku terletak pada kemampuan individual yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk nyata. Bentuk ini misalnya terlihat pada postur tubuh yang besar dan kuat, urat-urat tubuh yang tampak pada saat berjalan dan pandangan yang memancarkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk secara cepat membaca situasi di sekitarnya. Seorang Kepala Suku juga diharuskan memiliki kepribadian yang baik dan tampak pada keramahan dalam bentuk memberikan salam kepada orang lain, menolong orang yang mengalami kesulitan, cepat dan tepat mengambil keputusan dalam keadaan darurat/perang (*wim*), melindungi orang-orang lain yang pelarian karena dikejar dalam perang suku (*wim ounik*), kemampuan untuk memprediksi (*balopa hajih*), kaya dengan harta benda (material), kepandaian berdiplomasi dan berpidato, keberanian memimpin perang, memiliki sifat murah hati, dan memiliki kemampuan supranatural, serta kemampuan-kemampuan tersebut selalu diwariskan kepada keturunannya secara alami atau tidak langsung (Mansoben, 1995:5).

Ciri kedua dari kepemimpinan kepala suku ini adalah pelaksanaan kekuasaan dijalankan oleh hanya satu orang saja, yang disebut pemimpin tunggal yang otonom. Namun pada kasus suku Danni (Lanny) ada tingkatan-tingkatan yang didasarkan pada kemampuan pengaruhnya. Contoh yang dapat dilihat adalah tradisi di dalam suku Danni yang mengklasifikasikan Pria Berwibawa ke dalam 3 (bagian) yaitu *wone enu/gain, lago lakak, endage warak, wone enu/gain*. Tiga

karakter itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melahirkan ide dari pikirannya dan *enu* artinya mengalahkan semuanya. Jadi *wone enu/gain* adalah orang yang melahirkan atau mengeluarkan ide dari pikirannya dengan kemampuan yang ia miliki dan mengalahkan semua orang yang mau bersaing dengannya. Sehingga *Wone enu/gain* memegang kekuasaan kepemimpinan yang tertinggi di wilayah suku Lanny, ia membawahi *ap inane bunu lombok* secara teritorial di suatu wilayah kekuasaan adat suku Lanny yang dibatasi dengan undang-undang yang tidak tertulis namun mengandung nilai sosial secara tradisional, *wone enu/gain* menjadi pemimpin yang tertinggi di wilayah suku Lanny karena ia memiliki semua kemampuan. Kemampuan yang tidak dimiliki oleh *lago lakak dan jabu ekak* semuanya ada pada *wone enu/gain* sehingga setiap *gen/marga (inanebunu lombok)* pun harus mendengarkan perintah dari *wone enu/gain endago warak* artinya nama seorang yang kaya, jadi *endage warak* adalah orang kaya, *endage warak* bisa berbuat apa saja karena ia kaya dan ia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang besar maupun kecil dengan harta kekayaannya. Seorang Kepala Suku juga mesti merupakan *ap kole* atau orang berbadan besar namun kehidupannya sederhana. Sehingga memiliki kemampuan yang terbatas untuk mempengaruhi masyarakat suku *Gain*. Contoh masyarakat pendukung kepemimpinan semacam ini adalah orang Danni, Orang Asmat, orang Melekagi, orang Moni, orang Maybrat, orang Muyu (Mansoben, 1995:5).

Dalam masyarakat suku Danni (Lanny), seorang Kepala Suku akan disahkan dalam sebuah ritual pengangkatan. Ritual pengangkatan ini sendiri dibagi dalam dua macam. Ritual pengangkatan yang pertama adalah Kepala suku terjadi bukan karena diangkat atau dipilih oleh orang lain tetapi ditunjuk dan diangkat oleh kepala suku yang bersangkutan dari keturunannya sendiri. Ia menilai cara-cara, gerak-gerik, sifat dan karakter sejak anak tersebut lahir. Sehingga setelah ia berusia tua dan merasa tidak bisa buat apa-apa ia memberikan mandat kepada anak yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan kepala suku, maka semua pihak harus taat mendengarkan perintah dari orang yang memberikan mandate tersebut sebagai kepala suku. Dalam proses ritual pengangkatan Kepala Suku, ia diangkat oleh masyarakat karena jago perang, mengalahkan musuh dengan strategi yang sangat unik yang tidak bisa ditiru oleh orang lain.

Bila ditinjau lebih jauh dari sistem kepemimpinan kepala suku dalam masyarakat Danni (Lanny) ini, banyak memiliki ciri-ciri spesifik yang memperjuangkan kesejahteraan umum, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjaga keselamatan bagi warganya.

Injeksi sistem kepemimpinan formal ke dalam sistem kepemimpinan tradisional mengakibatkan lahirnya dualisme kepemimpinan di dalam masyarakat suku Danni (Lanny). Awal kehadiran atau masuknya sistem kepemimpinan formal ini dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dan berlanjut hingga masa Indonesia. Dualisme kepemimpinan antara lokal (informal) dan formal berimbas pada kebingungan dalam masyarakat tradisional. Disinilah awal pengujian legitimasi kepemimpinan Kepala Suku yang telah ada bersinggungan dalam bentuk kooperasi dengan Kepala Desa yang memiliki legalitas atas ciri-ciri dan kredibilitasnya dalam arena perpolitikan di masyarakat, sementara kepemimpinan formal diterima dan diakui begitu saja tanpa adanya suatu pengujian legitimasi secara adat dalam masyarakat adat di Papua.

Kepemimpinan kepala suku yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Papua mulai tergeser dengan kehadiran kepemimpinan formal yang diturunkan oleh pemerintah yang diimplementasikan melalui program pembangunan di kampung, distrik, kabupaten, dan lainnya sehingga secara otomatis pengaruh kepemimpinan kepala-kepala suku yang orientasinya kepada kesejahteraan umum, menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjaga keselamatan bagi warganya semakin menurun dan mulai menyaksikan kepemimpinan formal (Kepala Kampung, Kepala Distrik, Bupati, Gubernur, DPR dan lain sebagainya) dengan implementasi program pembangunan, sementara kepemimpinan kepala suku implementasinya dengan kapabilitas yang dimilikinya lebih cenderung mengutamakan kesejahteraan warga melalui kejujuran, keadilan dan kebenaran sesuai adat istiadat masyarakat setempat, semuanya dilakukan dengan nurani yang polos tanpa ambisi radikal menjadi pemimpin/kepala suku. Lain halnya dengan kepemimpinan formal (Kepala Kampung, Kepala Distrik, Bupati, DPR dan lain sebagainya) selalu dengan ambisi untuk naik ke level yang lebih tinggi, juga mencari masa melalui politik yang mengarah kepada korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat adat.

Hubungan Kerjasama Pemimpin Informal dan Pemimpin Formal

Kepala Suku tidak berhubungan dengan Kepala Desa. Jabatan Kepala Suku adalah jabatan struktural budaya atau adat yang memiliki keahlian seperti jago perang, istri banyak, memiliki banyak babi dan lain sebagainya. Kepala Suku juga berperan penting di tingkatan masyarakat adat seperti pada perang suku, pembayaran mas kawin dan perkebunan harus di ketahui oleh kepala suku. Sedangkan Kepala Desa adalah jabatan struktural formal yang terkait dengan kebijakan administratif legal formal tata pemerintahan. Fungsinya antara lain menyangkut hal-hal seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hubungan kerja antara Kepala Suku dan Kepala Desa paling dominan terlihat dalam hal-hal berikut :

1. Kepala suku cenderung mengambil keputusan tentang hak-hak adat.
2. Kepala suku dilibatkan di pertemuan tingkat desa, distrik dan kabupaten untuk berbicara menyangkut kepentingan hak-hak masyarakat adat di daerah.
3. Kepala desa cenderung mengambil keputusan tentang pembangunan, pemerintahan dan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa juga cenderung mengikuti sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang.

Cara kepemimpinan kepala suku dan pembantu-pembantu kepala suku adalah turun temurun oleh ahli waris atau nenek moyang. Di dalam struktur kepala suku tidak ada pembantu tetapi akan melihat di mana kemampuan seorang pemuda yang hebat, jago berbicara, jago perang, jago perkebunan kemudian jabatan kepala suku adalah garis keturunan atau di ganti menjadi kepala suku di daerah itu. Dalam melaksanakan kepemimpinan tugas pemimpin informal atau kepala suku dengan aparatnya adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat tentang hak-hak milik masyarakat adat.
2. Menyampaikan isu tentang ada sesuatu dari pihak-pihak adat lain.
3. Menerima masukan dari masyarakat tentang hal-hal adat dan budaya.
4. Bekerja sama dengan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, 1994. **Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan**. Bina Aksara, Jakarta.
- Cohen dan Simamora, 1985. **Sosiologi Suatu Pengantar**.
- Kartono, 1983. **Pemimpin dan Kepemimpinan**.
- Khairudin, H., 1992. **Pembangunan Masyarakat**. Liberty, Jogjakarta.
- Koentjaraningrat, 1972. **Beberapa Pokok Antropologi**. Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- _____, 1992. **Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan**. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1997. **Pengantar Antropologi II, Pokok-Pokok Etnografi**. PT. Rineka Cipta, Bandung.
- Koentjaraningrat, dkk. 1994. **Seri Etnografi Indonesia Lima. Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk**. Djambatan, Jakarta.
- Lowie, R. H., 1949. **Primitive Society**. London : Routledge & Kegan Paul, Ltd.
- Mansoben, J.R., 1995. **Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya**. Leiden: LIPI-RIJKS Universiteit Leiden.
- Onong Effendi U, 1981. **Kepemimpinan dan Komunikasi**. Alumni, Bandung.
- Pamudji S. MPA., 1987. **Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia**. Balai Pustaka, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1985. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1974. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Penerbit: Balai Pustaka Nasional, Jakarta.
- Riyadi dan Deddy Supriady, 2005. **Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah**. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saparin, 1986. **Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa**. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Siagian, 1997. **Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi.**
- Siagian, P. Sondang., 2000. **Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateginya.** Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1994. **Filsafat Administrasi.** Haji Mas Agung, Jakarta.
- Surjadi, 1989. **Pembangunan Masyarakat Desa,** Penerbit CV. Mandar Maju, Mandar.
- Sujanto, 1986. **Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan.** Galia Indonesia, Jakarta.
- Mair, L. 1962. **Primitive Government.** Baltimore : Penguin Books.
- Soerjono Soekanto, 1990. **Hukum Adat Indonesia,** Edisi, Rineka Cipta, Bandung.
- Taliziduhu Ndraha, 2003. **Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru).** Rineka Cipta, Jakarta.
- Thoha, Mifta., 1983. **Kepemimpinan Dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku.** CV. Rajawali, Jakarta.
- Wijaya, 1987. **Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila.**
- Winardi, 1990. **Kepemimpinan Dalam Manajemen.** Rineka Cipta, Bandung